

**DETERMINAN BESARAN PENYISIHAN
AKTIVA PAJAK TANGGUHAN SEBAGAI
INSTRUMEN MANAJEMEN LABA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

YELI ROSI RAKHMAWATI
NIM C2C007138

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Yeli Rosi Rakhmawati
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007138
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **DETERMINAN BESARAN
PENYISIHAN AKTIVA PAJAK
TANGGUHAN SEBAGAI
INSTRUMEN MANAJEMNE LABA**

Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Zulaikha, Msi., Akt

Semarang, 19 April 2011

Dosen Pembimbing,

(Dra. Hj. Zulaikha, Msi., Akt)

NIP 19580525 199103 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Yeli Rosi Rakhmawati
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007138
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **DETERMINAN BESARAN
PENYISIHAN AKTIVA PAJAK
TANGGUHAN SEBAGAI
INSTRUMEN MANAJEMEN LABA**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 28 April 2011

Tim Penguji:

1. Dra. Hj. Zulaikha, Msi., Akt. (.....)
2. Dr. H. Raharja, M.Si., Akt. (.....)
3. Tri Jatmiko Wahyu Prabowo S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Yeli Rosi Rakhmawati, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Determinan Besaran Penyisihan Aktiva Pajak Tangguhan sebagai Instrumen Manajemen Laba**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 19 April 2011
Yang membuat pernyataan,

(Yeli Rosi Rakhmawati)

NIM : C2C007138

- ☺ Change your thoughts and you will change your world (Norman Vincent Peale)

- ☺ A journey of a thousand miles must begin with a single step (Lao Tzu)

- ☺ Belajarlah ketika orang lain tidur, bekerjalah ketika orang lain bermalasan, dan bermimpilah ketika orang lain berharap (William A. Ward)

- ☺ Nasib baik menunggu kita dimana-mana, tergantung pada kita untuk menemukannya (Seisi Kato)

- ☺ Di bangku kuliah, saya belajar bagaimana cara belajar yang baik dan benar...

Dedicated for:

My Beloved

Parents and

Brother...

ABSTRACT

This study aims to examine the deferred tax assets valuation allowance that is predicted to be used as an instruments of earnings management. Based on the Positif Accounting Theory, accounting decisions by management can be detected through the tightness of debt restrictions, political sensivity, management compensation agreements, the big bath approach, and the income smoothing. In particular, this study empirically tested managerial discretion in determining the deferred tax assets valuation allowance account refers to PSAK No. 46 which seems to be used for purposes of earnings management.

The population of this research is the non-financial firms listed on the Indonesia Stock Exchange in the year 2005-2009. There are 56 firms to be the sample in this research, but only 47 firms that can be analyzed by multiple regression. The sample selection was done by purposive sampling method.

The results showed that the independent variable (debt to equity ratio, firm size, big bath, and income smoothing) simultaneously affect the amount of deferred tax assets valuation allowance. Only firm size and big bath variables that has a significant correlation with the amount of deferred tax assets valuation allowance individually, and the others don't.

Keywords: earnings management, deferred tax assets valuation allowance, debt to equity ratio, firm size, big bath, income smoothing.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan yang diprediksi dapat menjadi instrumen manajemen laba. Berdasarkan Teori Akuntansi Positif, perilaku manajer dalam membuat keputusan akuntansi dapat dideteksi melalui keketatan batasan hutang, sensitivitas politik, perjanjian kompensasi manajemen, pendekatan *big bath*, dan *income smoothing*. Secara khusus penelitian ini menampilkan pengujian empiris atas kebijakan manjerial dalam menentukan akun penyisihan aktiva pajak tangguhan dengan mengacu pada PSAK No. 46 yang nampaknya digunakan untuk tujuan manajemen laba.

Yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan non-finansial yang terdaftar di BEI pada tahun 2005-2009. Ada 56 perusahaan yang dapat dijadikan sampel penelitian, tetapi yang dapat dianalisis dengan regresi berganda hanya sebanyak 47 perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen (*debt to equity ratio*, ukuran perusahaan, *big bath*, dan *income smoothing*) secara bersama-sama berpengaruh terhadap besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan. Namun demikian, secara individu hanya variabel ukuran perusahaan dan variabel *big bath* yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan. Variabel *debt to equity ratio* dan *income smoothing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan.

Kata kunci : manajemen laba, penyisihan aktiva pajak tangguhan, *debt to equity ratio*, ukuran perusahaan, *big bath*, *income smoothing*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Determinan Besaran Penyisihan Aktiva Pajak Tangguhan sebagai Instrumen Manajemen Laba**”. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program studi ilmu Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis juga sangat menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, petunjuk, bimbingan, saran, serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan kritik yang membangun bagi penulis.
3. Dra. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, senantiasa memberikan saran, dukungan, bimbingan, motivasi, dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
4. Surya Rahardja, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali yang memberikan dukungan, arahan, dan saran selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro khususnya Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama kuliah.
6. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah membantu selama proses perkuliahan.
7. Orangtuaku tercinta, Bapak Sardju dan Ibu Dyah Utaminingsih yang selalu mendoakan, sabar dalam mendidik serta memberikan kasih sayang, dukungan, serta doa kepada penulis agar terus maju serta tidak mudah menyerah.
8. Kakakku, Hermawan Novayanto yang telah memberikan motivasi serta inspirasi kepada penulis.
9. Keluarga Bulik Rasipah, yang selalu memberikan semangat dan mendengar keluh kesah penulis.
10. Keluarga alm. Ibu Asmar, yang telah menjadi keluarga kedua penulis di Semarang. Terimakasih karena telah menganggap penulis seperti keluarga sendiri.
11. Sahabat-sahabatku, Cio, cik Im, ma2 ndut, Yuyu, Indah, Jatu, Aa ndut, Be2k, Me2i, Abas, Ko2h, Plathypuss, Monce, mas Totok, Reny, Amel, Hana, Naz, Ri2n, Phika, Uchunk, dan Eko, yang telah mengisi hari-hariku dan selalu mendukung serta mengingatkanku. Thank's for all guys.
12. Anak-anak bundaku (teman satu bimbingan), Vera, Mirza, dan Jiwo. Terimakasih atas bantuannya teman, tetap semangat, selalu berjuang, jangan mudah menyerah untuk sms bunda.

13. Teman-teman Akuntansi 2007 lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu disini.
14. Teman-teman KKN 2010 Desa Kembangarum Kecamatan Semarang Barat, Rino “Babe”, Reny “sapi”, Re2 “mama”, Jackson “Bang jek”, Ivo “si bawel”, evi “te2h”, Bang Fahmi, Wanti, Mbak Riska, Syifa, Mas Wempy, dan si bontot Ilham. Terimakasih untuk kenangannya.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis sebagai manusia, sehingga penulis menerima masukan dan saran dari semua pihak yang bermanfaat untuk perbaikan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat meberikan manfaat bagi semua pihak.

Semarang, 19 April
2011
Penulis

Yeli Rosi Rakhmawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan	14
1.4 Sistematika Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori	17
2.1.1 Teori Akuntansi Positif (<i>Positive Accounting theory</i>)	17
2.1.2 Manajemen Laba	23
2.1.3 PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan	33

2.1.4 Aktiva Pajak Tangguhan	34
2.1.4.1 Pengertian	34
2.1.4.2 Pengakuan	35
2.1.4.3 Pengukuran	37
2.1.4.4 Penilaian Kembali	38
2.2 Penelitian Terdahulu	41
2.3 Kerangka Pemikiran	45
2.4 Pengembangan Hipotesis	47
2.4.1 <i>Debt/ Equity Hypothesis</i>	47
2.4.2 <i>Political Costs Hypothesis</i>	48
2.4.3 <i>Big Bath Hypothesis</i>	49
2.4.4 <i>Income Smoothing Hypothesis</i>	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	52
3.1.1 Variabel Dependen (Y)	52
3.1.2 Variabel Independen (X)	53
3.1.2.1 <i>Debt to Equity Rasio</i>	53
3.1.2.2 Ukuran Perusahaan	54
3.1.2.3 <i>Big Bath</i>	54
3.1.2.4 <i>Income smoothing</i>	55
3.2 Populasi dan Sampel	57
3.3 Jenis dan Sumber Data	58
3.4 Metode Pengumpulan Data	58

3.5 Metode Analisis	59
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif	59
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	59
3.5.2.1 Uji Multikolinieritas	59
3.5.2.2 Uji Autokorelasi	60
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas	60
3.5.2.4 Uji Normalitas	61
3.5.3 Uji Hipotesis	62
3.5.3.1 Persamaan Regresi Linier Berganda	62
3.5.3.2 <i>Goodness of Fit Model</i>	63
3.5.3.2.1 Koefisien Determinasi	63
3.5.3.2.2 Uji F (pengujian secara simultan)	63
3.5.3.2.3 Uji t (pengujian secara parsial)	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	66
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	66
4.2 Analisis Data	70
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	70
4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik	72
4.2.2.1 Uji Normalitas	73
4.2.2.2 Uji Multikolonieritas	78
4.2.2.3 Uji Autokorelasi	79
4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas	80
4.2.3 Uji Hipotesis	82

4.2.3.1 Regresi Linier Berganda	82
4.2.3.2 <i>Goodness of Fit Model</i>	83
4.2.3.2.1 Koefisien Determinasi	84
4.2.3.2.2 Uji F	84
4.2.3.2.3 Uji t	84
4.2.3.2.3.1 Uji pengaruh rasio <i>debt to equity</i> terhadap besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan	85
4.2.3.2.3.2 Uji pengaruh ukuran perusahaan terhadap besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan	85
4.2.3.2.3.3 Uji pengaruh <i>big bath</i> terhadap besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan	86
4.2.3.2.3.4 Uji pengaruh <i>income smoothing</i> terhadap besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan	86
4.3 Interpretasi Hasil	87
4.3.1 Uji Pengaruh Rasio <i>Debt to Equity</i> Terhadap Besarnya Penyisihan Aktiva Pajak Tangguhan	87
4.3.2 Uji Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Besarnya Penyisihan Aktiva Pajak Tangguhan	88
4.3.3 Uji Pengaruh <i>Big Bath</i> Terhadap Besarnya Penyisihan Aktiva Pajak Tangguhan	89
4.3.4 Uji Pengaruh <i>Income Smoothing</i> Terhadap Besarnya Perubahan Penyisihan Aktiva Pajak Tangguhan	90
BAB V PENUTUP	92

5.1 Kesimpulan	92
5.2 Keterbatasan	94
5.3 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	43
Tabel 4.1 Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria	67
Tabel 4.2 Tabel Sampel Penelitian	68
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Periode Tahun 2005 – 2009	70
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Variabel BBATH	72
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas dengan One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test	75
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas dengan One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test (Setelah Data Outlier Dibuang)	77
Tabel 4.7 Ringkasan Hasil Uji Multikolonieritas	78
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Korelasi	79
Tabel 4.9 Nilai Durbin Watson	80
Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Regresi Linier Berganda	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	45
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Histogram	74
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Normal Probability Plot	74
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Histogram (Setelah Data Outlier Dibuang)	76
Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Normal Probability Plot (Setelah Data Outlier Dibuang)	76
Gambar 4.5 Hasil Uji Heteroskedastiositas dengan Grafik Scatterplot	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A1 Tabulasi Data	99
Lampiran A2 Tabulasi Data	101
Lampiran B1 Input SPSS (Sebelum Outlier Dibuang)	104
Lampiran B2 Input SPSS (Setelah Outlier Dibuang)	106
Lampiran C1 Output SPSS (Sebelum Outlier Dibuang).....	108
Lampiran C2 Output SPSS (Setelah Outlier Dibuang).....	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Adanya perbedaan antara prinsip akuntansi dengan aturan perpajakan mengharuskan manajer untuk membuat dua jenis laporan laba rugi, yaitu laporan laba rugi komersil dan laporan laba rugi fiskal. Laporan laba rugi komersil disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan laporan laba rugi fiskal disusun berdasarkan aturan perpajakan. Penghasilan kena pajak yang merupakan dasar perhitungan pajak penghasilan merupakan *output* dari rekonsiliasi fiskal antara laporan laba rugi komersil dengan ketentuan pembukuan pajak menurut Undang-Undang Perpajakan. Hal ini menimbulkan dua jenis penghasilan, yaitu laba sebelum pajak (menurut perhitungan laba rugi berdasarkan standar akuntansi) dan penghasilan kena pajak (menurut perhitungan laba rugi fiskal). Oleh karena itu diperlukan suatu pernyataan standar yang dapat mengatur penyandingan laba sebelum pajak dengan penghasilan kena pajak tersebut secara *intra-comptable*.

Penyandingan secara *intra-comprable* berarti bahwa dalam laporan keuangan komersil terkandung perhitungan pajak penghasilan (PPh) menurut ketentuan perpajakan (Kiswara, 2009). Pernyataan standar yang dimaksud adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan ini efektif berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang

mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan *go public*, sedangkan bagi perusahaan lainnya mulai pada atau setelah 1 Januari 2001.

Perbedaan antara laba sebelum pajak dengan penghasilan kena pajak disebabkan oleh adanya perbedaan konsep antara akuntansi dengan pajak dalam pengakuan penghasilan dan biaya. Dalam konteks akuntansi PPh, perbedaan tersebut menghasilkan dua jenis beda, yaitu beda waktu (*temporary/ timing differences*) dan beda tetap (*permanent differences*). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan maupun *Statement of Financial Accounting Standards* (SFAS) No. 109 mengenai *Accounting for Income Taxes* bertujuan untuk mengakomodir perbedaan waktu pengakuan dalam pengungkapan laporan keuangan komersil dengan pendekatan aktiva kewajiban (Kiswara, 2009).

Pendekatan aktiva kewajiban bertujuan untuk mengakui jumlah kewajiban pajak yang harus dilunasi atau jumlah pajak yang dapat diminta kembali selama tahun berjalan. Tujuan yang lain adalah untuk mengakui aktiva dan kewajiban pajak tangguhan atas konsekuensi pajak dimasa depan dari peristiwa yang telah diakui dalam laporan keuangan atau Surat Pemberitahuan pajak (Kieso, *et al.*, 2002). Metode aktiva kewajiban ini menekankan pada pengukuran dan pelaporan jumlah-jumlah di neraca. Keunggulan utama metode aktiva kewajiban untuk pajak tangguhan adalah:

1. karena aktiva dan kewajiban yang dicatat berdasarkan metode ini sesuai dengan definisi FASB mengenai elemen-elemen keuangan, maka metode ini secara konseptual konsisten dengan standar-standar lain;

2. metode aktiva kewajiban adalah metode yang fleksibel. Metode ini mengakui perubahan dalam berbagai situasi dan menyesuaikan jumlah yang dilaporkan. Fleksibilitas ini dapat meningkatkan prediktif laporan keuangan.

Pajak penghasilan dalam laporan laba rugi disajikan sebesar beban yang diperhitungkan menurut perhitungan laba rugi akuntansi. Oleh karena itu, ketika beban pajak penghasilan disajikan dalam neraca, diperlukan akun pajak penghasilan ditangguhkan (aktiva atau kewajiban pajak yang ditangguhkan) yang dapat menampung selisih pajak akibat beda waktu antara akuntansi dan pembukuan pajak dalam mengakui penghasilan dan biaya (Kiswara, 2009). Jika saldo akun pajak ditangguhkan berada di sisi kiri neraca (sisi debet) maka akan timbul komponen aktiva pajak tangguhan. Sedangkan jika saldo akun pajak ditangguhkan berada di sisi kanan neraca (sisi kredit) maka akan timbul komponen kewajiban pajak tangguhan.

Melalui penerapan pendekatan aktiva kewajiban, PSAK No. 46 mengakhiri praktik akuntansi dan pelaporan keuangan sebelumnya mengenai beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan pengakuan kosekuensinya dalam neraca yang tidak seimbang (Harnanto, 2003). Yang dimaksud dengan pengakuan tidak seimbang disini adalah penyajian beban pajak penghasilan di laporan laba rugi dalam jumlah yang ditaksir dan kemudian menyajikan konsekuensinya di dalam neraca sebagai taksiran utang pajak penghasilan (hanya satu sisi-kewajiban atau utang pajak penghasilan).

Perusahaan mengakui aktiva pajak tangguhan hanya apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dapat dimanfaatkan (PSAK No. 46, par. 24), atau jika laba fiskal akan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi saldo rugi fiskal yang boleh dikompensasi (PSAK No. 46, par. 27). Chao, *et al.*, (2004) mengemukakan bahwa:

“Specifically, SFAS No. 109 requires the recognition of deferred tax assets for all deductible temporary differences, operating loss carryforwards, and tax credit carryforwards. Once these deferred tax assets have been recognized, they must then be reduced by a valuation allowance if “it is more likely than not (a likelihood of more than 50 percent) that some portion or all of the deferred tax assets will not be realized” (SFAS No. 109, para. 17e). When a valuation allowance is recorded, the deferred tax asset is decreased by the valuation allowance (contra asset account) and income tax expense is increased, thus recording income from continuing operations.”

Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip *konservatisme* dalam penyajian aktiva pajak tangguhan di laporan keuangan, yaitu dengan membentuk penyisihan aktiva pajak tangguhan. Aktiva pajak tangguhan harus dikurangi oleh suatu akun penyisihan jika berdasarkan semua bukti yang tersedia, lebih mungkin daripada tidak bahwa sebagian atau seluruh aktiva pajak tangguhan tersebut tidak akan terealisasi (Kieso, *et al.*, 2002). Ketika penyisihan atas aktiva pajak tangguhan dicatat, maka aktiva pajak tangguhan akan dikurangi dengan penyisihan tersebut sehingga beban pajak tangguhan akan meningkat dan hal tersebut akan mengurangi laba operasi berkelanjutan (Chao, *et al.*, 2004).

PSAK No. 46 juga mensyaratkan agar pada tanggal neraca perusahaan harus meninjau kembali nilai tercatat aktiva pajak tangguhan. Jika laba fiskal

tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aktiva pajak tangguhan, maka perusahaan harus menurunkan nilai tercatat aktiva pajak tangguhan tersebut. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali jika besar kemungkinan laba fiskal memadai. Oleh karena itu, setiap tahun manajer harus membuat sebuah penilaian untuk menentukan apakah akan mencatat atau akan menyesuaikan aktiva pajak tangguhan dan besarnya penyisihan (Chao, *et al.*, 2004).

Penyesuaian besarnya akun penyisihan akan berdampak langsung pada laba operasi berjalan, yaitu pada penetapan pajak tangguhan yang kemudian akan mempengaruhi laba bersih periode berjalan (Miller & Skinner, 1998). Dengan adanya hubungan keagenan, tentunya maka manajer akan berusaha menampilkan laba perusahaan dengan kualitas baik.

Ada beberapa alasan mengapa besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan dapat digunakan sebagai instrumen manajemen laba seperti yang dikemukakan oleh Miller dan Skinner (1998) berikut:

“(1) There are no well-established formulae or clear guidelines for determining the appropriate level of the allowance; (2) The appropriate level of the allowance depends on manager’s expectations about future earnings, sometimes decades into the future; (3) For many firms this provision is large enough to allow managers to make material adjustments to accounting earnings (changes in the allowance have a dollar-for-dollar effect on bottom-line earnings).”

Oleh karena tidak adanya panduan ataupun rumus pasti untuk menentukan besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan, maka manajer memiliki kebebasan dalam penentuan besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan. Hal ini juga

mengindikasikan bahwa manajer dapat mempengaruhi besarnya laba operasi periode berjalan dengan bebas pula.

Penilaian manajer untuk menentukan besarnya aktiva pajak tangguhan dan besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan juga bersifat subyektif, sehingga manajer harus menguji pertimbangan pokok yang digunakannya dalam menilai kemungkinan pendapatan masa lalu dan pendapatan masa depan yang akan ditampilkan (Chao, *et al.*, 2004). Dengan diberlakukannya PSAK No. 46 maka manajer memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan akuntansi yang akan digunakan dalam pertimbangan penilaian penyisihan aktiva pajak tangguhan. Hal ini memperkuat adanya indikasi terjadinya manajemen laba melalui penyisihan aktiva pajak tangguhan.

Beberapa penelitian menjelaskan bahwa besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan dapat menjadi instrumen manajemen laba (Miller & Skinner, 1998; Chao,*et al.*, 2004; Frank & Rego, 2006; dan Schrand & Wong, 2003). Hal ini dikarenakan perubahan besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan dapat mempengaruhi laba operasi berjalan; dan dalam SFAS No. 109 dijelaskan mengenai laba perusahaan pada periode mendatang secara keseluruhan, yang mana di dalamnya terkandung sejumlah subyektivitas yang perlu dipertimbangkan.

Teori Akuntansi Positif (*Positif Accounting Theory*) merupakan dasar analisis dari penelitian ini. Chao, *et al.*, (2004) yang juga menggunakan teori tersebut dalam penelitiannya, menganalisis terjadinya manajemen laba melalui penyisihan aktiva pajak tangguhan dengan menguji hubungan antara penyisihan

aktiva pajak tangguhan dengan keketatan batasan hutang, perjanjian kompensasi manajemen, sensitivitas politik, pendekatan *big bath*, dan *income smoothing*.

Sebagian besar perjanjian hutang berisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur selama jangka waktu perjanjian. Sebagai contoh, perusahaan kreditur mensyaratkan untuk memelihara level *debt-to-equity* tertentu, cakupan hutang, modal kerja, dan ekuitas pemegang saham. Jika perjanjian tersebut dilanggar, maka kreditur akan memberikan *penalty* kepada si debitur. Kemungkinan adanya pelanggaran perjanjian hutang menjadi batasan manajer dalam mengelola perusahaan. Untuk menghindari pelanggaran tersebut, manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat menaikkan laba masa kini, yang mana dalam hal ini kebijakan tersebut adalah menentukan besarnya penyisihan yang lebih rendah. Chao, *et al.*, (2004) tidak menemukan bukti bahwa batasan keketatan hutang mendorong terjadinya manajemen laba. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Miller & Skinner (1998), dan Frank & Rego (2006). Mereka tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara *leverage* dengan penyisihan aktiva pajak tangguhan.

Parameter rencana bonus menetapkan bahwa bonus diberikan sepanjang tahun, dan jika bonus dapat diberikan, maka jumlah maksimumnya adalah fungsi linier positif dari laba periode berjalan. Hal ini berarti bahwa bonus berkorelasi positif dengan laba periode berjalan. Manajer akan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat menaikkan laba periode kini agar jumlah bonus yang diterimanya juga semakin besar, yang mana dalam hal ini kebijakan tersebut adalah menentukan besarnya penyisihan yang lebih rendah. Chao, *et al.*, (2004)

menemukan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi pemberian bonus manajemen (misalnya harga saham, ukuran kinerja non-finansial, dsb) sehingga hasil penelitiannya atas hipotesis rencana bonus tercampur. Visvanathan (1998) juga tidak menemukan bukti terjadinya manajemen laba karena dorongan rencana bonus.

Sensivitas politik diproksikan dengan ukuran perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar (terutama perusahaan monopolis dan atau yang menguasai hajat hidup orang banyak) akan lebih terlihat, sehingga akan lebih menjadi subyek pengamatan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan besar akan cenderung melakukan manajemen laba untuk menghindari biaya politik. Perusahaan tersebut akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat memperkecil labanya, yang dalam hal ini adalah menentukan besarnya penyisihan yang lebih tinggi. Dari ketiga proksi yang digunakan untuk menganalisis sensitivitas politik (*total assets*, *market value of common stock*, dan *net sales*), Chao, *et al.*, (2004) tidak menemukan bukti adanya manajemen laba atas dorongan sensitivitas politik.

Big bath biasanya dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan perusahaan bersih dari biaya-biaya yang berpotensi muncul di kemudian hari tanpa dapat dihindari. Hal ini merupakan tindakan antisipasi pihak manajemen agar kinerja keuangan perusahaan di periode mendatang akan terlihat lebih baik. Pada saat perusahaan mengalami kerugian besar dan tidak ada harapan untuk dapat menunjukkan kinerja keuangan yang baik, maka biaya yang berpotensi muncul di kemudian hari akan dimasukkan sekaligus sehingga kerugian akan menjadi besar, tetapi perusahaan akan menjalani tahun-tahun berikutnya tanpa

beban potensi biaya tersebut (Muyassaroh, 2006). Chao, *et al.*, (2004) menemukan bukti bahwa *big bath* merupakan alat manajemen laba. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Visvanathan (1998).

Income smoothing merupakan tindakan yang sengaja dilakukan manajer untuk mengurangi variasi abnormal laba dalam batas-batas yang diijinkan dalam praktik akuntansi dan prinsip manajemen yang wajar. Manajer akan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat menurunkan laba saat laba periodik perusahaan naik secara drastis. Begitu pula sebaliknya, manajer akan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat menaikkan laba saat laba periodik perusahaan turun secara drastis. Chao, *et al.*, (2004) menemukan bahwa *income smoothing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penyisihan aktiva pajak tangguhan. Hal ini berarti bahwa *income smoothing* bukan instrumen manajemen laba. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Miller & Skinner (1998). Namun, hasil tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Schrand & Wong (2003) yang menemukan bahwa bank menggunakan akun penyisihan untuk meratakan laba.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Chao, *et al.*, (2004) pada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Namun demikian, adanya perbedaan dalam penerapan aturan perpajakan dan aturan pasar modal di setiap negara membuat penelitian ini penting untuk dilakukan, yaitu untuk mengetahui apakah konsep yang sama dapat diaplikasikan di Indonesia. Adapun faktor-faktor yang akan diuji kembali dalam penelitian ini adalah batasan keketatan hutang, sensitivitas politik, pendekatan *big bath*, dan *income smoothing*.

Perjanjian kompensasi manajemen tidak diuji kembali dalam penelitian ini karena pada laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai dasar pemberian kompensasi manajemen.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, judul untuk penelitian ini adalah **“Determinan Besaran Penyisihan Aktiva Pajak Tangguhan Sebagai Instrumen Manajemen Laba.”**

1.2 Rumusan Masalah

PSAK No. 46 mewajibkan adanya peninjauan kembali atas nilai tercatat aktiva pajak tangguhan pada tanggal neraca. Oleh karena itu setiap tahun manajer harus membuat sebuah penilaian untuk menentukan saldo aktiva pajak tangguhan dan besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan. Jika laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aktiva pajak tangguhan (PSAK No. 46, par 35) atau jika dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak di masa depan dengan probabilitas kurang dari 50%, maka nilai tercatat aktiva pajak tangguhan tersebut harus diturunkan dengan membentuk penyisihan aktiva pajak tangguhan (Chao, *et al.*, 2004).

Penilaian manajer untuk menentukan besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan tersebut bersifat subyektif. Dengan diberlakukannya PSAK No. 46 maka manajer memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan akuntansi yang akan digunakan dalam pertimbangan penilaian penyisihan aktiva pajak tangguhan sehingga dapat mengindikasikan adanya manipulasi laba. Namun demikian, ada

beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan manajer dalam menentukan penyisihan aktiva pajak tangguhan seperti yang dikemukakan oleh Chao, *et al.* (2004) berikut:

1. *Debt to Equity Rasio*

Sebagian besar perjanjian hutang berisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur selama jangka waktu perjanjian. Misalnya saja persyaratan untuk memelihara *debt to equity rasio* pada level tertentu. Hal ini menjadi batasan bagi manajer dalam mengelola perusahaan. Jika *debt to equity rasio* perusahaan terlalu tinggi, maka perusahaan akan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat menaikkan laba perusahaan pada masa kini. Dalam hal ini kebijakan yang dimaksud adalah dengan menentukan besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan yang lebih rendah. Begitu pula sebaliknya, jika *debt to equity rasio* perusahaan terlalu rendah, maka manajer akan membentuk penyisihan aktiva pajak tangguhan yang lebih tinggi.

2. *Perjanjian Kompensasi manajemen*

Perjanjian kompensasi manajemen yang didasarkan pada laba perusahaan memiliki korelasi positif dengan laba periode berjalan. Oleh karena itu, manajer akan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat menaikkan laba periode kini agar bonus yang akan diterima juga semakin besar. Kebijakan akuntansi yang dimaksud adalah dengan menentukan besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan yang lebih rendah.

3. Ukuran Perusahaan

Perusahaan besar (terutama perusahaan monopolis dan atau yang menguasai hajat hidup orang banyak) akan lebih terlihat sehingga akan lebih menjadi subyek pengamatan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan besar akan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat menurunkan laba periode kini agar dapat menghindari biaya politik yang besar. Dalam hal ini, kebijakan akuntansi yang dimaksud adalah dengan membentuk penyisihan aktiva pajak tangguhan yang tinggi agar dapat menurunkan laba. Ukuran suatu perusahaan dapat dinilai dari total aset, harga pasar saham biasa, atau dari total penjualan bersihnya.

4. Pendekatan *Big Bath*

Biasanya perusahaan melakukan *big bath* agar laporan keuangannya bersih dari biaya-biaya yang berpotensi muncul di kemudian hari. Pada saat perusahaan mengalami kerugian besar, maka biaya-biaya yang berpotensi muncul di kemudian hari akan diakui pada saat itu juga sehingga kerugian akan menjadi besar, tetapi perusahaan akan menjalani tahun-tahun berikutnya tanpa beban potensi biaya tersebut. Dalam hal ini, perusahaan melakukan *big bath* dengan cara membentuk penyisihan aktiva pajak tangguhan yang lebih tinggi karena penyisihan yang lebih tinggi akan menyebabkan beban pajak tangguhan yang lebih tinggi pula.

5. *Income Smoothing*

Manajer akan menggunakan kebijakan akuntansinya untuk mengurangi jarak deviasi antara laba periode berjalan dengan laba yang diharapkan perusahaan.

Ketika laba periodik perusahaan naik secara drastis, maka manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat menurunkan laba tersebut. Dalam hal ini kebijakan akuntansi yang dimaksud adalah dengan menentukan besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan yang lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya, ketika laba periodik perusahaan turun secara drastis, maka manajer akan membentuk penyisihan aktiva pajak tangguhan yang lebih rendah agar dapat menaikkan laba perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Chao, *et al.*, (2004). Oleh karena dalam laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai dasar pemberian kompensasi manajemen, maka pada penelitian ini hanya akan dibahas empat dari lima permasalahan yang telah dijelaskan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *debt to equity ratio* berpengaruh negatif terhadap besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan?
3. Apakah *big bath* berpengaruh positif terhadap besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan?
4. Apakah *income smoothing* berpengaruh positif terhadap besarnya perubahan penyisihan aktiva pajak tangguhan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *debt to equity ratio* terhadap besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan.
2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan.
3. Untuk menganalisis pengaruh *big bath* terhadap besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan.
4. Untuk menganalisis pengaruh *income smoothing* terhadap besarnya perubahan penyisihan aktiva pajak tangguhan.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pihak perusahaan untuk menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangan secara transparan dan dapat diandalkan.
2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat mendorong investor agar lebih teliti dalam menggunakan informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan emiten.
3. Bagi khasanah ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori serta dapat menjadi salah satu referensi bagi pengembangan penelitian berikutnya.

1.4 Sistematika Penelitian

Penelitian ini terbagi menjadi lima bagian, yaitu pendahuluan, telaah pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Bagian pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran penelitian secara garis besar mengenai penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bagian yang kedua adalah telaah pustaka yang berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Dalam bagian ini juga dibahas mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Selain itu dijelaskan juga mengenai kerangka pemikiran yang menjelaskan timbulnya hipotesis penelitian.

Bagian yang ketiga dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang berisi uraian mengenai metode penelitian, yang mencakup penentuan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai variabel-variabel penelitian dan pengukurannya.

Bagian keempat dalam penelitian ini adalah hasil dan pembahasan yang berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis terhadap data dan temuan empiris yang diperoleh. Sedangkan bagian yang terakhir adalah penutup. Bagian penutup dalam penelitian ini berisi tentang simpulan dari pelaksanaan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

Bagian kelima dari penelitian ini adalah penutup yang menguraikan tentang simpulan atas hasil pembahasan, analisis data penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting theory*)

Istilah teori akuntansi positif menunjuk kepada sebuah teori yang mencoba untuk membuat prediksi yang bagus dari kejadian dunia nyata. Teori akuntansi positif berkaitan dengan memprediksi tindakan seperti pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer perusahaan dan bagaimana respon manajer terhadap standar akuntansi baru yang diusulkan (Scott, 2003).

Aliran positif didasarkan pada anggapan bahwa kekuasaan dan politik merupakan sesuatu yang tetap dan sistem sosial dalam organisasi merupakan fenomena empiris konkrit dan bebas nilai atau tidak tergantung pada manajer dan karyawan yang bekerja dalam organisasi tersebut (Machintos dalam Chariri dan Ghozali, 2007). Atas dasar hal ini, pendukung aliran positif menganggap dirinya sebagai seorang pengamat yang netral, obyektif, dan tidak dipengaruhi nilai berkaitan dengan fenomena akuntansi yang diamati.

Teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Dengan kata lain, teori akuntansi positif dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Penjelasan dan prediksi dalam teori akuntansi positif didasarkan pada proses kontrak atau hubungan keagenan antara manajer dengan kelompok

lain seperti investor, kreditor, auditor, pihak pengelola pasar modal, dan institusi pemerintah (Watts dan Zimmerman, 1990).

Teori akuntansi positif didasarkan pada premis bahwa individu selalu bertindak atas dasar motivasi pribadi (*self-seeking motives*) dan berusaha memaksimalkan keuntungan pribadi. Teori akuntansi positif memiliki fokus ekonomi dan berusaha menjawab pertanyaan seperti (Chariri dan Ghozali, 2007):

1. apakah biaya yang dikeluarkan untuk memilih metode akuntansi sesuai dengan manfaat yang diperoleh?
2. apakah biaya regulasi dan proses penentuan standar akuntansi sesuai dengan manfaatnya?
3. apakah laporan keuangan berpengaruh terhadap harga saham?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, teori akuntansi positif menggunakan asumsi sebagai berikut (Chariri dan Ghozali, 2007):

1. manajer, investor, kreditor, dan individu lain bersikap rasional dan berusaha memaksimalkan kepuasan;
2. manajer memiliki kebebasan untuk memilih metode akuntansi yang memaksimalkan kepuasan mereka atau mengubah kebijakan produksi, investasi, dan pendanaan perusahaan untuk memaksimalkan kepuasan mereka;
3. manajer mengambil tindakan yang memaksimalkan nilai perusahaan.

Menurut Watts dan Zimmerman (1990), teori akuntansi telah memberikan kontribusi bagi pengembangan akuntansi, misalnya:

1. menghasilkan pola sistematis dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik terhadap pola tersebut;

2. memberikan kerangka yang jelas dalam memahami akuntansi;
3. menunjukkan peran utama *contracting cost* dalam teori akuntansi;
4. menjelaskan mengapa akuntansi digunakan dan memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan-pilihan akuntansi;
5. mendorong riset yang relevan dengan akuntansi dengan menekankan pada prediksi dan penjelasan terhadap fenomena akuntansi.

Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa perilaku oportunistik manajer dapat diprediksikan dengan *Positive Accounting Theory* ke dalam tiga bentuk hipotesis, yaitu:

1. *The Bonus Plan Hypothesis*

Pada dasarnya tidak ada teori yang menjelaskan susunan pola kompensasi manajemen. Akan tetapi, ada dua tipe dasar rencana kompensasi untuk menghargai kinerja manajemen yang diukur dengan bilangan akuntansi (biasanya laba) yaitu rencana bonus dan rencana kinerja (kinerja saham dan rencana kinerja unit).

Jika rencana bonus memberikan dorongan kepada manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka indeks kinerja dari perhitungan bonus harus berhubungan dengan dampak tindakan manajer terhadap nilai perusahaan. Jika faktor lain dianggap *ceteris paribus*, maka semakin besar korelasi antara laba dengan dampak tindakan manajer terhadap nilai perusahaan, semakin mungkin digunakannya rencana bonus berdasarkan laba untuk memberikan penghargaan kepada manajer.

Lebih banyak penelitian empiris yang menguji dampak dari rencana bonus terhadap pilihan manajer atas prosedur akuntansi daripada dampak dari rencana kinerja terhadap pilihan manajer atas prosedur akuntansi. Parameter rencana bonus menetapkan bahwa bonus diberikan sepanjang tahun, dan jika bonus dapat diberikan, maka jumlah maksimumnya adalah fungsi linier positif dari laba periode berjalan. Hasil tersebut memberikan petunjuk kepada peneliti bahwa kompensasi manajer berdasarkan rencana bonus meningkat sejalan dengan peningkatan laba periode berjalan. Berdasarkan asumsi tersebut, peningkatan nilai sekarang atas laba perusahaan pada periode berjalan akan meningkatkan nilai sekarang dari kompensasi manajer. Hal tersebut dapat diringkas ke dalam hipotesis berikut:

Bonus plans Hypothesis. Jika semua hal sama (*ceteris paribus*), maka manajer sebuah perusahaan yang mempunyai rencana pemberian bonus akan lebih mungkin untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode yang akan datang ke dalam periode sekarang.

2. *The Debt Covenant Hypothesis*

Dalam hipotesis ini diasumsikan bahwa jika semua hal sama (*ceteris paribus*), semakin dekat manajer untuk melanggar *accounting-based debt covenant*, maka semakin memungkinkan manajer memilih prosedur akuntansi yang dapat menggeser penghasilan periode yang akan datang ke dalam periode sekarang. Alasannya adalah kenaikan laba bersih yang dilaporkan akan mengurangi kemungkinan kegagalan teknis.

Sebagian besar perjanjian hutang berisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh peminjam selama jangka waktu perjanjian. Sebagai contoh, perusahaan kreditur mensyaratkan untuk memelihara level *debt-to-equity* tertentu, cakupan hutang, modal kerja, dan ekuitas pemegang saham. Jika perjanjian tersebut dilanggar, maka perjanjian hutang dapat menjatuhkan denda, seperti kendala pada dividen atau pinjaman tambahan. Jelas bahwa kemungkinan adanya pelanggaran perjanjian merupakan batasan bagi manajer untuk menjalankan perusahaan. Untuk mencegah, atau paling tidak menunda pelanggaran tersebut, manajer mungkin menerapkan kebijakan akuntansi untuk menaikkan laba masa kini.

Demikian pula, hipotesis perjanjian utang memprediksi bahwa manajer perusahaan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi akan memilih kebijakan akuntansi yang kurang konservatif dibandingkan manajer perusahaan dengan rasio yang rendah, dan akan lebih mungkin untuk menentang standar baru yang membatasi kemampuan mereka untuk melakukannya dan atau yang dapat meningkatkan pendapatan volatilitas. Hipotesis biaya politik juga memprediksi bahwa manajer dari perusahaan yang lebih besar akan memilih kebijakan akuntansi yang lebih konservatif daripada manajer dari perusahaan yang lebih kecil, dan kemungkinan kecil menolak standar baru yang dapat melaporkan laba bersih yang lebih rendah.

3. *The Political Cost Hypothesis*

Dalam hipotesis ini dinyatakan bahwa jika semua hal sama (*ceteris paribus*), maka perusahaan yang menghadapi biaya politis tinggi akan semakin memungkinkan manajer untuk memilih kebijakan prosedur akuntansi yang menunda penghasilan sekarang untuk dilaporkan pada periode berikutnya.

Hipotesis biaya politik memperkenalkan dimensi politik dalam pemilihan kebijakan akuntansi. Sebagai contoh, biaya politik dapat dikenakan bagi perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi, yang mungkin menarik perhatian media dan konsumen. Perusahaan yang sangat besar mungkin ditampilkan dengan standar kinerja yang lebih tinggi, misalnya dengan mematuhi tanggung jawab sosial, hanya karena mereka merasa menjadi besar dan kuat. Jika perusahaan yang besar juga memberi keuntungan lebih besar, maka biaya politiknya akan diperbesar.

Tiga hipotesis di atas menunjukkan bahwa teori akuntansi positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan: 1) antara manajemen dengan pemilik; 2) antara manajemen dengan kreditor; dan 3) antara manajemen dengan pemerintah. Beberapa situasi menetapkan adanya biaya agensi karena adanya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Bartov *et al.*, (2000) memperhatikan bahwa biaya agensi termasuk dorongan manajer untuk mengelola laba. Manajemen laba dapat dilakukan oleh manajer dengan berbagai cara seperti melakukan perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya, mempercepat atau

menunda pendapatan dan biaya, menghilangkan atau mengurangi *discretionary cost*, dsb. *Discretionary cost* merupakan biaya input yang tidak dapat ditelusuri dampak atau hubungannya dengan output, atau dapat juga disebut biaya yang tidak dapat dikendalikan hasilnya.

2.1.2 Manajemen Laba

Manajemen perusahaan bertanggungjawab kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam perusahaan. Masing-masing pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda atas kegiatan bisnis perusahaan sehingga masing-masing pihak dengan menggunakan wewenang yang dimiliki akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya. Salah satu contoh kewenangan akuntan untuk meratakan labanya adalah dengan manajemen laba (Hasan. A, *et al.*, 2009).

Menurut Healy dan Wahlen (1999), manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangannya dalam laporan keuangan dan dalam menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan tersebut sehingga menyesatkan *stakeholder* mengenai kinerja ekonomi yang mendasari perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian yang tergantung pada praktik akuntansi yang dilaporkan. Tujuan manajer melakukan manajemen laba menurut Bauman, *et al.*, (2001) adalah untuk: 1) menghindari rugi; 2) menghindari pelaporan penurunan laba; 3) *avoiding failing meet or beat analyst forecast*; 4) *invoke an earnings big bath*.

Sedangkan pola manajemen laba yang biasa dilakukan menurut Scott (2003) yaitu:

1. *Taking a Bath*

Manajer mencoba mengalihkan *expected future cost* ke masa kini agar memiliki peluang yang lebih besar mendapatkan laba di masa mendatang. Biasanya dilakukan bila perusahaan mengadakan restrukturisasi atau reorganisasi.

2. *Income Minimization*

Manajer mencoba memindahkan beban ke masa kini agar memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan laba di masa mendatang.

3. *Income Maximization*

Manajer mencoba meningkatkan laba masa kini dengan memindahkan beban ke masa mendatang. Biasanya dilakukan manajer dalam rangka memperoleh bonus tahunan.

4. *Income Smoothing*

Tindakan dimana manajer memperhalus fluktuasi laba dari periode ke periode dengan cara memindahkan laba dari periode yang memiliki laba tinggi ke periode yang memiliki laba rendah.

Scott (2003) juga menyebutkan bahwa manajer memiliki beberapa motif yang mendorong mereka melakukan manajemen laba, antara lain:

1. Alasan bonus (*bonus scheme*)

Adanya asimetri informasi mengenai keuangan perusahaan menyebabkan pihak manajemen dapat mengatur laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka.

2. Kontrak utang jangka panjang

Semakin dekat perusahaan dengan perjanjian kredit, maka manajer akan cenderung memilih prosedur yang dapat “memindahkan” laba periode mendatang ke periode berjalan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan dalam pelunasan utang.

3. Motivasi politik

Banyak perusahaan yang secara politis cukup terlihat. Khususnya pada perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak, perusahaan di industri strategis (contohnya minyak dan gas), serta perusahaan monopolis atau yang mendekati monopolis (contohnya maskapai penerbangan atau perusahaan listrik). Perusahaan-perusahaan tersebut akan cenderung mengelola labanya untuk mengurangi visibilitasnya. Misalnya dengan menggunakan praktik atau prosedur akuntansi, khususnya selama periode dengan tingkat kemakmuran yang tinggi. Hal ini mendasari hipotesis biaya politik dari teori akuntansi positif.

4. Motivasi pajak

Salah satu dorongan yang dapat memicu manajer untuk mengelola laba adalah untuk meminimalkan pajak atau total pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Namun, aturan perpajakan dengan aturan akuntansi perusahaan cenderung berbeda sehingga mengurangi ruang gerak manajer dalam melakukan pengelolaan laba. Oleh karena itu pajak tidak memainkan peranan penting dalam keputusan manajemen laba.

5. Pergantian CEO (*Chief of Executive Officer*)

Banyak dorongan untuk melakukan pengelolaan laba muncul saat terjadi pergantian CEO, salah satunya berdasarkan hipotesis rencana bonus bahwa

CEO yang mendekati masa pensiun akan sangat mungkin terlibat dalam strategi pemaksimalan laba untuk meningkatkan bonusnya. Begitu pula dengan CEO dari perusahaan berkinerja buruk, juga akan melakukan pemaksimalan laba untuk mencegah atau menunda pemecatan. Atau, CEO tersebut dapat melakukan “*big bath*” untuk meningkatkan laba atas pendapatan masa depan yang positif. Motivasi ini juga berlaku bagi CEO yang baru, terutama jika CEO yang lama dapat disalahkan atas adanya penghapusan dalam jumlah besar.

6. IPO (*Initial Public Offering*)

Perusahaan yang baru pertama kali melakukan penawaran umum perdana (IPO) biasanya menghadapi masalah bagaimana menetapkan harga pasar dari sahamnya. Oleh karena itu, informasi laporan keuangan yang terdapat dalam prospektus dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat. Sebagai contoh, informasi laba bersih dapat digunakan sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa pasar memberikan respon secara positif terhadap ramalan laba sebagai nilai perusahaan, sehingga manajemen perusahaan yang akan *go public* cenderung melakukan pengelolaan atas laba yang dilaporkan pada prospektus mereka dengan harapan memperoleh harga lebih tinggi atas sahamnya.

7. Untuk menyampaikan informasi kepada investor

Mengevaluasi dan membandingkan kinerja perusahaan dilakukan investor dengan melihat kebijakan akuntansi yang dipilih perusahaan tersebut. Perlu diingat bahwa pasar efisien terjadi saat informasi tersedia untuk umum. Jika manajemen laba dapat mengungkapkan informasi intern perusahaan, maka hal ini tentunya akan meningkatkan keinformatifan laporan keuangan.

Investor yang rasional pada dasarnya akan tertarik pada kinerja perusahaan di masa depan dan menggunakan laba periode berjalan untuk memprediksi kemungkinan laba masa depan yang akan mereka peroleh. Yang memiliki informasi mengenai prospek laba masa depan tersebut adalah manajemen. Jika laba periode berjalan dikelola pada jumlah tertentu yang merupakan estimasi laba terbaik manajer, dan pasar menyadari hal tersebut, maka harga saham akan secara cepat menampilkan informasi intern tersebut. Akibatnya, penggunaan manajemen laba yang bertanggung jawab akan meningkatkan kemungkinan arah informasi diagonal dari sistem informasi.

Alat utama dari manajemen laba adalah dikresionari akrual. Dechow, *et al.*, (1995) mengevaluasi beberapa alternatif model akrual untuk mendeteksi manajemen laba. Model yang digunakan adalah *the Healy model*, *the DeAngelo model*, *the Jones model*, *the modified Jones model*, dan *the industry model*. Dari kelima model tersebut, model Jones yang dimodifikasi adalah yang paling kuat dalam mendeteksi manajemen laba.

Hasan A. *et al.*, (2009) merangkum beberapa penelitian yang memberikan penjelasan mengenai manajemen laba sebagai berikut: Schipper (1989) memberikan kerangka konseptual untuk menganalisis manajemen laba dari perspektif keuangan, De Angelo (1988) menunjuk manajemen laba pada kasus pengambil alihan kekayaan (*buy out*), Burgstahler dan Eames (1998) menyimpulkan bahwa perusahaan mengelola laba untuk memenuhi analisis peramalan keuangan, serta Watts dan Zimmerman (1990) mengemukakan bahwa

manajemen laba dapat dijelaskan melalui sudut pandang perjanjian (dengan manajer ataupun kreditor), rencana bonus, serta sensitivitas politik.

Oleh karena manajemen laba tidak dapat diukur secara langsung, maka ada beberapa literatur manajemen laba yang memaparkan tentang metode-metode yang dapat berpotensi menunjukkan manajemen laba. Xiong, Yan (2006) mengemukakan bahwa ada empat metode yang dapat menjadi instrumen manajemen laba, yaitu:

1. *The discretionary total accruals method*

Metode total akrual diskresioner merupakan metode yang paling umum digunakan untuk mengukur manajemen laba. Metode ini mengasumsikan bahwa manajer secara pokok mendasarkan pada kebebasan akuntansi akrual tertentu sebagai instrumen manajemen laba Jones (1991). Akuntansi akrual terdiri dari akrual diskresioner yang ditentukan oleh manajemen dan akrual non-diskresioner yang ditentukan secara ekonomi. Oleh karena itu pada metode ini diperlukan pemisahan akrual menjadi komponen diskresioner dan komponen non-diskresioner. Yang kemudian menjadi proksi manajemen laba adalah komponen diskresioneri akrual.

Dechow, *et al.*, (1995) mengembangkan pengukuran manajemen laba dari model Jones (1991) dengan memisahkan akrual menjadi *normal accrual* dan *discretionary accrual*. Kesulitan utama dalam menggunakan metode ini adalah perlunya identifikasi dan pemisahan total akrual ke dalam komponen yang dikelola (*managed*) dan yang tidak dikelola (*unmanaged*).

Cara mengukur *discretionary accrual* dengan menggunakan model Jones yaitu dengan meregresikan total akrual terhadap *gross plant, property, and aqipment*, dan perubahan pendapatan. Regresi tersebut akan menghasilkan koefisien yang kemudian digunakan untuk mengestimasi *unmanaged accruals*. Sedangkan *managed accruals*nya diperoleh dari residual persamaan regresi tersebut. Persamaan regresi yang dimaksud adalah sebagai berikut (Jones, 1991):

$$TAC_{it} / TA_{it-1} = \beta_0 + \beta_1 (1 / TA_{it-1}) + \beta_2 (\Delta REV_{it} / TA_{it}) + \beta_3 (PPE_{it} / TA_{it}) + e_{it} \quad (2.1)$$

Dimana,

TAC_{it} = Total akrual, yaitu perbedaan antara *income* sebelum pos luar biasa dengan aliran kas neto dari operasi perusahaan i pada periode t

TA_{it-1} = *Total assets* perusahaan i pada periode t-1

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel

ΔREV_{it} = Perubahan penjualan perusahaan i dari periode t-1 ke periode t

PPE_{it} = *Gross property, plant, and equipment* perusahaan i pada periode t

e_{it} = error

Model persamaan tersebut dimodifikasi oleh Dechow, *et al.* (1995) dengan menggunakan persamaan:

$$TAC_{it} / TA_{it-1} = \beta_0 + \beta_1(1/ TA_{it-1}) + \beta_2 (\Delta REV_{it} - \Delta AR_{it}) / TA_{it} + \beta_3 (PPE_{it} / TA_{it}) + e_{it} \quad (2.2)$$

Definisi setiap variabel sama dengan yang dijelaskan di atas, kecuali ΔAR_{it} yaitu perubahan piutang dagang perusahaan i dari periode t-1 ke periode t.

Setelah diperoleh koefisien regresi masing-masing variabel dari persamaan regresi *modified model Jones*, maka dapat dihitung total akrual diskresioner (*discretionary total accruals*) dengan persamaan sebagai berikut:

$$TAEM_{it} = TAC_{it} / TA_{it-1} - \{\beta_1(1/ TA_{it-1}) + \beta_2(\Delta REV_{it} - \Delta AR_{it}) / TA_{it} + \beta_3(PPE_{it} / TA_{it})\} \quad (2.3)$$

Definisi setiap variabel sama dengan yang dijelaskan di atas, kecuali $TAEM_{it}$ yaitu *managed component* dari total akrual perusahaan i pada periode t, atau sama dengan *discretionary total accruals*.

2. *The single accrual method*

Metode ini menguji manajemen laba hanya dengan satu macam akrual saja, misalnya estimasi depresiasi (Teoh, *et al.*, 1998); dan atau *deferred tax valuation allowance* (Teoh, *et al.*, 1998; Bauman, *et al.*, 2001; Chao, *et al.*, 2004; Schrand & Wong, 2006).

Pengukuran manajemen laba dengan menggunakan satu macam akrual saja mempunyai kelemahan, yaitu manajemen laba hanya dapat dideteksi jika akrual yang diuji dapat dikelola, dan biasanya sulit untuk mengidentifikasi akrual yang secara khusus digunakan untuk melakukan manajemen laba. Walaupun akrual yang tepat telah diuji, dampak dari pengelolaan akrual tunggal secara individu mungkin memberikan hasil statistik yang tidak signifikan. Kelemahan yang kedua adalah, secara logis diasumsikan bahwa

manajer menggunakan lebih dari satu macam akrual ketika melakukan manajemen laba. Oleh karena itu, sementara metode akrual tunggal efektif dalam mendeteksi manajemen laba pada beberapa situasi, akan tetapi metode ini gagal dalam mendeteksi manajemen laba pada sebagian besar situasi (Mc Nichols & Wilson, 1988 dalam Xiong, Yan, 2006).

Penelitian ini menggunakan metode akrual tunggal untuk mengukur manajemen laba. Lebih lanjut, tingkat validitas metode akrual tunggal adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan metode total akrual. Hal ini disebabkan karena akrual tunggal dapat dengan mudah dipengaruhi oleh variabel lain. Misalnya saja perubahan kenaikan laba pada perusahaan yang memiliki *deferred tax valuation allowance* dapat mengindikasikan terjadinya manajemen laba. Padahal, hal ini dapat juga dipengaruhi oleh kebijakan kredit perusahaan atau perubahan kondisi ekonomi secara menyeluruh.

3. *The total accrual method*

Metode total akrual menguji manajemen laba dengan menginvestigasi total akrual dan perubahan kebijakan akuntansi, sebagaimana yang digunakan oleh Healy (1985) ketika menguji dampak rencana bonus terhadap keputusan akuntansi. Healy (1985) mengemukakan bahwa total akrual lebih efektif daripada perubahan kebijakan akuntansi dalam mendeteksi manajemen laba. Alasannya adalah perubahan kebijakan akuntansi lebih sulit dan lebih mahal untuk dilakukan.

Berdasarkan proposal teoritis Healy (1985), metode total akrual mendefinisikan manajemen laba sebagai selisih antara laba bersih sebelum pos luar biasa dengan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Sehingga dapat dirumuskan persamaan sebagai berikut:

$$\mathbf{CFOEM}_{it} = \mathbf{NI}_{it} / \mathbf{TA}_{it-1} - \mathbf{CFO}_{it} / \mathbf{TA}_{it-1} \quad (2.4)$$

Dimana,

\mathbf{CFOEM}_{it} = Komponen laba dari perusahaan i pada periode t yang *dimanage*, yang mana sama dengan total akrual

\mathbf{NI}_{it} = *Net income before extraordinary item* (laba bersih sebelum pos luar biasa) perusahaan i pada periode t

\mathbf{CFO}_{it} = Arus kas bersih dari kegiatan operasi perusahaan i pada periode t

\mathbf{TA}_{it-1} = *Total assets* perusahaan i pada periode t-1

4. *The distribution method*

Metode ini menguji kelaziman manajemen laba dengan tujuan menghindari pelaporan rugi dan atau penurunan laba. Burgstahler & Dichev (1997) menguji distribusi laba dan laba periode berjalan yang dilaporkan untuk mendeteksi adanya manajemen laba. Mereka menemukan bahwa terdapat frekuensi terjadinya manajemen laba yang lebih tinggi pada perusahaan dengan kecondongan laba positif (atau perubahan laba) dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kecondongan laba negatif (atau perubahan laba). Pendekatan ini dianggap lebih obyektif dalam hal mendeteksi manajemen laba daripada metode-metode lain yang telah dibahas sebelumnya. Namun,

pendekatan ini gagal melaporkan perluasan manajemen laba dan metode atau akrual khusus yang digunakan untuk melakukan manajemen laba (Healy & Wahlen, 1999).

Masing-masing metode memiliki keunggulan dan kelemahan. Untuk mendapatkan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba, maka penelitian tentang manajemen laba seharusnya menggunakan ukuran manajemen laba yang berbeda agar dapat meningkatkan kekuatan hasil penelitiannya.

2.1.3 PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan

PSAK No. 46 dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan efektif berlaku pada 1 Januari 1999 bagi perusahaan yang *go public*, sedangkan untuk perusahaan lainnya mulai efektif berlaku pada 1 Januari 2001. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan dengan mengubah pendekatan yang digunakan, yaitu dari *income statement approach* ke *balance sheet approach*. Pernyataan ini juga mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya.

Masalah utama perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal berikut ini, (PSAK No. 46, par 1) :

1. pemulihan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan; dan

2. transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.

Pengakuan aktiva atau kewajiban pada laporan keuangan mengindikasikan bahwa perusahaan akan dapat memulihkan nilai tercatat aktiva atau akan melunasi nilai tercatat kewajiban tersebut. Jika kemungkinan besar pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban tersebut akan mengakibatkan *future tax effect* bagi perusahaan, maka perusahaan harus mengakui kewajiban pajak tangguhan atau aktiva pajak tangguhan dengan beberapa pengecualian.

2.1.4 Aktiva Pajak Tangguhan

2.1.4.1 Pengertian

Menurut PSAK No. 46, aktiva pajak tangguhan (*deferred tax assets*) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan adanya sisa kompensasi kerugian. Aktiva pajak tangguhan menampilkan manfaat pajak masa depan yang berasal dari beda temporer yang dapat dikurangkan, rugi pajak, dan kredit pajak (Visvanathan dan Krishna, 2003).

Plesko (dalam Phillips, 2003) menyebutkan bahwa perbedaan temporer dapat timbul dari perbedaan aturan pelaporan masing-masing sistem, tetapi dapat juga karena GAAP (di Indonesia dikenal dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum) memberikan kebebasan yang lebih besar pada manajer dalam menentukan jumlah pendapatan dan beban untuk masing-masing periode dibandingkan dengan

aturan perpajakan. Jadi perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary difference*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai kewajiban dilunasi (PSAK No. 46, par 07).

Contoh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan menimbulkan aktiva pajak tangguhan adalah biaya manfaat pensiun (*retirement benefit cost*). Biaya tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan laba akuntansi, tetapi baru dapat dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal pada saat iuran/ manfaat pensiun tersebut dibayar oleh perusahaan. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut akan menimbulkan aktiva pajak tangguhan karena manfaat ekonomi berupa pengurangan terhadap laba fiskal baru dapat diperoleh perusahaan saat iuran/ manfaat pensiun dibayar oleh perusahaan.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus mencerminkan konsekuensi pajak untuk pemulihan atas nilai tercatat aktiva atau penyelesaian kewajiban yang diharapkan perusahaan pada tanggal neraca. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan tidak boleh didiskonto (*discounted*) (PSAK No. 46, par 33 & 34).

2.1.4.2 Pengakuan

Aktiva pajak tangguhan (*deferred tax assets*) diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang kemungkinan besar perbedaan temporer tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal

pada masa yang akan datang. Namun ada pengecualian untuk aktiva pajak tangguhan yang timbul dari:

1. goodwill negatif yang diakui sebagai pendapatan tangguhan sesuai dengan PSAK No. 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha; atau
2. pengakuan awal aktiva atau kewajiban pada suatu transaksi yang:
 - a. bukan transaksi penggabungan usaha; dan
 - b. tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba fiskal.

Menurut PSAK No. 46, saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah penghasilan kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dikompensasikan:

1. apakah perusahaan mempunyai perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah yang memadai sehingga memungkinkan sisa kompensasi dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluarsa;
2. apakah perusahaan memiliki kemungkinan untuk memperoleh laba fiskal agar saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluarsa;
3. apakah saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi timbul dari kasus-kasus tertentu yang hampir tidak mungkin berulang.

Jika laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aktiva pajak tangguhan tidak diakui (PSAK No. 46, par. 27).

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa terdapat kemungkinan laba fiskal di masa yang akan datang tidak memadai untuk dapat memanfaatkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atau untuk dapat dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan prinsip *konservatisme* dalam penyajian aktiva pajak tangguhan pada laporan keuangannya, yaitu dengan membentuk penyisihan aktiva pajak tangguhan.

Konservatisme dapat diartikan bahwa akuntan harus melaporkan yang terendah dari beberapa nilai yang mungkin untuk aktiva dan pendapatan, dan yang tertinggi dari beberapa nilai yang mungkin untuk kewajiban dan beban (Hendriksen, 1994). Prinsip *konservatisme* ini dianggap penting untuk mengimbangi optimisme yang berlebihan dari manajer (kiranya didorong oleh rencana bonus yang berdasarkan laba).

2.1.4.3 Pengukuran

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus diukur menggunakan tarif pajak yang berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak/ peraturan pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca (PSAK No. 46, par 30). Jika tarif pajak dan peraturan pajak baru telah diumumkan oleh pemerintah maka dapat dianggap

bahwa tarif dan peraturan tersebut telah secara substantif berlaku walaupun berlakunya tarif dan peraturan tersebut secara efektif mungkin saja masih beberapa bulan setelah pengumumannya. Dalam hal ini aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus dihitung dengan tarif dan peraturan pajak baru yang telah dinyatakan berlaku (PSAK No. 46, par 31).

Jika tarif pajak yang berlaku berbeda untuk tingkat laba fiskal yang berbeda maka aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak rata-rata yang akan dikenakan terhadap laba fiskal (rugi pajak) pada saat perbedaan temporer membalik (*reverse*) (PSAK No. 46, par 32).

2.1.4.4 Penilaian Kembali

PSAK No. 46 menetapkan bahwa pada setiap tanggal neraca, perusahaan harus meninjau kembali nilai tercatat aktiva pajak tangguhan. Jika laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aktiva pajak tangguhan (PSAK No. 46, par. 35), atau bila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak pada periode mendatang dengan probabilitas kurang dari 50%, maka nilai tercatat aktiva pajak tangguhan tersebut harus diturunkan dengan membentuk penyisihan aktiva pajak tangguhan (Chao, *et al.*, 2004). Penurunan nilai tersebut harus disesuaikan kembali jika kemungkinan besar laba fiskal memadai (PSAK No. 46, par. 35).

SFAS No. 109 mengungkapkan bukti-bukti positif yang menghindari pembentukan penyisihan dan bukti-bukti negatif yang mendukung pembentukan penyisihan tersebut. Bukti positif yang mengindikasikan bahwa lebih dari 50%

kemungkinan realisasi di masa yang akan datang atas aktiva pajak tangguhan sehingga tidak diperlukan pembentukan penyisihan, diantaranya adalah sebagai berikut (Kiswara, 2009):

1. terdapat sejarah laba yang besar secara konsisten;
2. laba yang akan datang dapat dijamin terjadinya;
3. terdapat penghasilan kena pajak di masa depan yang wajar, dan timbul dari pembalikan beda waktu (kewajiban pajak tangguhan) dalam merealisasi manfaat dari aktiva pajak;
4. strategi perencanaan pajak yang baik berguna dalam penyajian realisasi aktiva pajak tangguhan;
5. nilai buku aktiva melebihi basis pajak adalah cukup dalam merealisasikan aktiva pajak tangguhan;
6. terdapat kontrak *lucrative*;
7. terdapat *backlog* penjualan yang signifikan.

Sedangkan bukti negatif yang mengindikasikan bahwa terdapat probabilitas 50% atau kurang dari realisasi di masa yang akan datang atas aktiva pajak ditangguhkan sehingga diperlukan pembentukan penyisihan, diantaranya adalah sebagai berikut (Kiswara, 2009):

1. sejarah kerugian di masa sebelumnya;
2. suatu ekspektasi dari kerugian di masa yang akan datang walaupun pada tahun sebelumnya menunjukkan profitabilitas;
3. manfaat pajak yang telah terjadi atau dinikmati;

4. ketidakpastian dan sifat bersyaratnya, seperti kasus hukum yang dapat mengakibatkan gangguan kelanjutan usaha.

Namun dalam PSAK No. 46 tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai penyisihan aktiva pajak tangguhan maupun bukti-bukti yang mendukung atau menghindari pembentukan penyisihan tersebut.

Chao, *et al.*, (2004) menyatakan bahwa SFAS No. 109 mengidentifikasi empat sumber penghasilan kena pajak untuk merealisasi aktiva pajak tangguhan, yaitu:

1. pembalikan di masa depan atas perbedaan sementara yang dapat dikenakan pajak yang ada saat ini;
2. penghasilan kena pajak masa depan, tidak termasuk pembalikan perbedaan sementara dan kompensasi ke depan;
3. penghasilan kena pajak dalam tahun-tahun kompensasi ke belakang sebelumnya, jika kompensasi ke belakang diperbolehkan dalam Undang-Undang Perpajakan; dan
4. strategi perencanaan pajak.

Pedoman khusus tersebut memberikan model perilaku terikat kepada para peneliti atas penilaian akun penyisihan aktiva pajak tangguhan. Beberapa artikel bisnis dan jurnal penelitian membuktikan bahwa penilaian akun penyisihan meningkatkan kemampuan manajer untuk mengelola laba (Peavy & Nurnberg, 1993; Petree, *et al.*, 1995).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menguji manajemen laba melalui akun penyisihan aktiva pajak tangguhan dengan menggunakan sampel perusahaan heterogen. Penelitian-penelitian tersebut menguji dorongan perjanjian untuk mengelola laba dan ditemukan bukti kecil mengenai manajemen laba (Miller & Skinner, 1998; Bauman *et al.*, 2001; Chao *et al.*, 2004; dan Frank & Rego, 2006).

Miller & Skinner (1998) menggunakan sampel 200 perusahaan yang memiliki *Other Post-Employment Benefit* (OPEB) dalam jumlah besar untuk menguji apakah perubahan penilaian penyisihan memiliki pengaruh terhadap faktor-faktor yang diidentifikasi dalam SFAS No. 109 dan terhadap perubahan rasio *leverage*. Mereka tidak menemukan hubungan yang signifikan antara perubahan penyisihan dengan perubahan *leverage* maupun proksi untuk *income smoothing*.

Bauman, *et al.*, (2001) menggunakan pendekatan kontekstual untuk menilai apakah perubahan penilaian penyisihan yang diamati konsisten dengan motivasi lain untuk mengelola laba. Dalam penelitian tersebut ditemukan bukti yang konsisten dalam penggunaan penyisihan aktiva pajak tangguhan untuk mengelola laba.

Chao, *et al.*, (2004) menggunakan teori akuntansi positif dalam penelitiannya untuk mengidentifikasi pilihan variabel akuntansi yang mempengaruhi keputusan manajer dalam mengubah tingkat penilaian penyisihan aktiva pajak tangguhan. Lebih lanjut, Frank & Rego (2006) memberikan bukti tambahan dengan menguji dorongan berdasarkan pasar modal (*capital-market-*

based incentives) untuk mengelola laba. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa manajer menggunakan penilaian penyisihan untuk meratakan laba agar memenuhi analisis peramalan laba masa depan. Akan tetapi penelitian tersebut tidak memberikan bukti bahwa manajer menggunakan penilaian penyisihan untuk mengelola dua target laba (*positive and prior year's reported earning*) untuk memenuhi perilaku “*big bath*”.

Schrand & Wong (2003) menggunakan sampel penelitian yang berbeda dengan para peneliti di atas. Mereka menggunakan sampel perusahaan homogen, yaitu perusahaan yang tergabung dalam sektor perbankan komersial dengan tujuan meningkatkan kekuatan pengujian mereka. Mereka menguji perilaku perataan laba melalui dua dorongan berdasarkan pasar modal (analisis peramalan target laba dan analisis historis target laba) dan menemukan bukti yang konsisten bahwa bank menggunakan akun penilaian penyisihan untuk meratakan laba.

Perbedaan akhir antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Schrand & Wong (2003) menimbulkan ketidakpastian tentang manajemen laba yang tidak mudah terjadi melalui penilaian akun penyisihan. Schrand & Wong (2003) mengakui kekurangan yang potensial dari generalisasi hasil mereka, tetapi juga menyimpulkan bahwa mereka mengharapkan hasil yang sama untuk industri yang berbeda karena dorongan manajemen laba dan pedoman penentuan akun penyisihan berdasarkan SFAS No. 109 untuk bank adalah tidak khusus. Bagaimanapun juga, bank memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengelola laba melalui akun penyisihan. Hal ini disebabkan karena bank memiliki aktiva pajak tangguhan dan motivasi

tambahan yang lebih besar untuk meratakan laba yang dilaporkan ke laba masa lalu untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran terhadap kebutuhan modal.

Secara ringkas, penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai manajemen laba melalui akun penyisihan aktiva pajak tangguhan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Gregory S Miller & Douglas J Skinner (1998)	Penyisihan aktiva pajak tangguhan dan manajemen laba	Kewajiban pajak tangguhan, penghasilan kena pajak masa depan yang diharapkan, aktiva pajak tangguhan, tingkat <i>leverage</i> , perubahan laba.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajer menentukan penilaian penyisihan sesuai dengan SFAS No. 105 2. Penilaian penyisihan berpengaruh positif dengan aktiva pajak tangguhan 3. Penilaian penyisihan berpengaruh negatif dengan penghasilan kena pajak masa depan yang diharapkan 4. Tidak ada hubungan langsung antara penilaian penyisihan dengan tingkat <i>leverage</i> dan proksi untuk <i>income smoothing</i>.
Bauman, <i>et al.</i> , (2001)	Manajemen laba melalui perubahan penyisihan aktiva pajak tangguhan	Aktiva pajak tangguhan, perubahan penyisihan aktiva pajak tangguhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak perubahan penyisihan terhadap laba tidak dapat ditentukan 2. Jumlah yang dilaporkan dalam rekonsiliasi tingkat pajak merupakan ukuran laba yang paling baik sebagai akibat perubahan penilaian penyisihan 3. Penilaian penyisihan konsisten dengan SFAS No. 109, dan tidak konsisten dengan perilaku “big bath”
Chia-Ling Chao, <i>et al.</i> , (2004)	Manajemen laba melalui penilaian penyisihan	Perubahan penyisihan pajak tangguhan, tingkat <i>leverage</i> , rencana bonus, ukuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batasan hutang tidak mendorong adanya manajemen laba 2. Selain laba periode berjalan,

	pajak tangguhan	perusahaan, <i>big bath</i> , dan perubahan laba	ada faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam menentukan bonus manajemen, sehingga hasil hipotesis ini menjadi bias 3. Tidak ditemukan hal yang mendukung hipotesis biaya politik 4. Penilaian penyisihan memiliki hubungan negatif dengan laba sehingga tidak sesuai dengan hipotesis <i>big bath</i> . 5. Perusahaan akan lebih memilih <i>big bath</i> daripada <i>income smoothing</i> ketika laba perusahaan di bawah tingkat laba normal.
Mary Margaret Frank & Sonja Olhofs Rego (2006)	Manajemen laba melalui akun penyisihan	Penilaian akun penyisihan (VAA), target laba tahunan (keuntungan positif, laba tahu lalu, dan rata-rata analisis ramalan)	1. Perusahaan menggunakan VAA untuk meratakan laba agar memenuhi analisis peramalan laba 2. Tidak ditemukan bukti bahwa manajer menggunakan penilaian penyisihan untuk mengelola dua target laba (<i>positive and prior year's reported earning</i>) untuk memenuhi perilaku "big bath"
Schrand & Wong (2003)	Manajemen laba melalui penilaian penyisihan aktiva pajak tangguhan	Komponen total aktiva pajak tangguhan, penilaian penyisihan aktiva pajak tangguhan, CAR, realisasi laba masa depan	1. Bank tidak mencatat penilaian penyisihan untuk mengelola laba, tetapi lebih kepada mengikuti pedoman SFAS No. 105 2. Bank menggunakan penilaian penyisihan untuk meratakan laba.

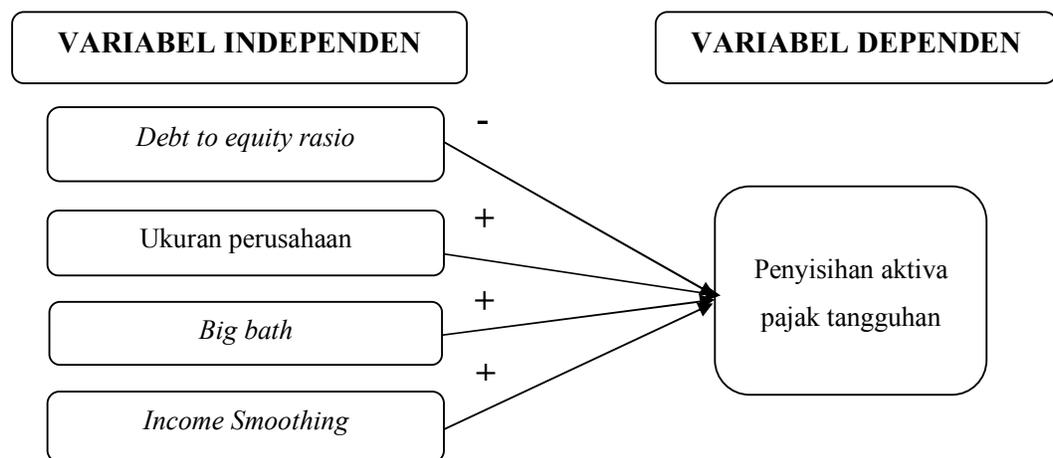
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Chao, *et al.*, (2004) tetapi dengan hanya menggunakan empat variabel independen, yaitu *debt to equity ratio*, ukuran perusahaan, *big bath*, dan *income smoothing*. Variabel rencana bonus tidak dimasukkan dalam penelitian ini karena dalam laporan

keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai dasar pemberian kompensasi manajemen.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini dijelaskan dan digambarkan kerangka pemikiran penelitian. Kerangka pemikiran penelitian menunjukkan pengaruh empat variabel independen, yaitu *debt to equity ratio*, ukuran perusahaan, *big bath*, dan *income smoothing* terhadap penyisihan aktiva pajak tangguhan.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan antara hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menjamin seluruh hutangnya dengan modal yang dimilikinya. Ukuran ini berhubungan dengan keberadaan dan ketat atau tidaknya suatu persetujuan kredit. Semakin tinggi rasio hutang/ ekuitas, semakin dekat perusahaan dengan batas perjanjian/ peraturan kredit (Watts dan Zimmerman, 1990). Semakin dekat

perusahaan dengan batas perjanjian kredit, maka manajer akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami *default* (kegagalan dalam memenuhi kewajiban).

Ukuran perusahaan merupakan variabel proksi dari aspek politik. Perusahaan dengan ukuran besar secara politis akan cukup terlihat sehingga akan memiliki kecenderungan untuk melakukan manajemen laba untuk menghindari biaya politik. Perusahaan yang lebih besar akan lebih terlihat sehingga akan lebih menjadi subyek pengamatan pemerintah dan subek transfer kekayaan (Chao, *et al.*, 2004). Dengan demikian perusahaan besar akan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat memperkecil labanya.

Big bath serupa dengan pilihan untuk melakukan prosedur-prosedur penurunan laba yang akan meningkatkan kemungkinan untuk memenuhi sasaran-sasaran pendapatan di masa depan (Belkaoui, 2006). Perusahaan melakukan *big bath* dengan tujuan agar laporan keuangan perusahaan akan bersih dari biaya-biaya yang berpotensi muncul di kemudian hari tanpa dapat dihindari. Tindakan ini merupakan antisipasi dari pihak manajemen untuk dapat memberikan dasar perpajakan yang lebih baik dalam mengelola kinerja keuangan perusahaannya. *Big bath* pada umumnya dilakukan dalam dua kondisi yang ekstrim, yaitu pada saat perusahaan sedang mengalami kerugian atau keuntungan besar. Pada kondisi pertama, yaitu pada saat perusahaan mengalami kerugian besar dan tidak ada harapan untuk dapat menunjukkan kinerja keuangan yang baik, maka biaya yang berpotensi muncul di kemudian hari akan dimasukkan sekaligus sehingga

kerugian akan menjadi besar, tetapi perusahaan akan menjalani tahun-tahun berikutnya tanpa beban potensi biaya tersebut (Muyassaroh, 2006).

Income smoothing merupakan normalisasi laba yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai *trend* atau level laba tertentu (Belkaoui dalam Chariri dan Ghozali, 2007). Manajer akan menggunakan kebijakan akuntansinya untuk mengurangi jarak deviasi antara laba periode berjalan dengan laba yang diharapkan perusahaan (Chao, *et al.*, 2004). *Income smoothing* menunjukkan suatu usaha pihak manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi abnormal laba dalam batas-batas yang diijinkan dalam praktik akuntansi dan prinsip manajemen yang wajar. Manajer akan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat menurunkan laba saat laba periodik perusahaan naik secara drastis. Begitu pula sebaliknya, manajer akan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat menaikkan laba saat laba periodik perusahaan turun secara drastis.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 *Debt/Equity Hypothesis*

Semakin tinggi rasio *debt/ equity* perusahaan, maka semakin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Semakin tinggi rasio *debt/ equity*, semakin dekat perusahaan dengan batas perjanjian/ peraturan kredit (Watts dan Zimmerman, 1990). Semakin tinggi batasan kredit, maka makin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat

menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis (Watts dan Zimmerman, 1990).

Jika hipotesis *debt/ equity* dapat digunakan untuk menjelaskan kebijakan manajer dalam menilai besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan, maka manajer akan cenderung untuk mengurangi besarnya akun penyisihan tersebut sehingga laba perusahaan dapat meningkat. Chao, *et al.*, (2004) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap DTVA. Untuk menguji prediksi ini, batasan kredit diproksikan dengan rasio *debt to equity* (hutang/ ekuitas), sehingga hipotesis satu dirumuskan sebagai berikut:

H1 : rasio *debt to equity* perusahaan berpengaruh negatif terhadap besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan.

2.4.2 Political Costs Hypothesis

Hipotesis *political costs* menyatakan sebuah hubungan positif antara sensitivitas politik dan kemungkinan pengadopsian prosedur akuntansi yang dapat menurunkan laba periodik. Sensitivitas politik dalam penelitian ini diproksikan dengan ukuran perusahaan. Biaya politik yang dibebankan pada perusahaan merupakan fungsi dari ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang lebih besar akan lebih terlihat sehingga akan lebih menjadi subyek pengamatan pemerintah dan subyek transfer kekayaan (Chao, *et al.*, 2004). Jika biaya politik dapat digunakan untuk menjelaskan kebijakan manajer atas penilaian penyisihan, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan yang lebih besar dan lebih terlihat akan memilih penilaian penyisihan yang lebih besar pula untuk mengurangi jumlah

laba periodiknya sehingga biaya politik perusahaan dapat diminimalisasi. Untuk menguji hal tersebut maka hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2 : ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan.

2.4.3 *Big Bath Hypothesis*

Akuntansi “mandi besar” (*big bath accounting*) pada umumnya mengacu kepada langkah-langkah yang diambil oleh manajer mengurangi laba per saham di masa depan secara drastis. Situasi ini serupa dengan pilihan untuk melakukan prosedur-prosedur penurunan laba yang akan meningkatkan kemungkinan untuk memenuhi sasaran-sasaran pendapatan di masa depan (Belkaoui, 2006).

Sebuah penjelasan yang baik mengenai *big bath* adalah perusahaan kemungkinan besar akan melakukan *big bath* pada periode-periode tertentu, yaitu (Belkaoui, 2006):

1. ketika manajer baru mengambil alih, mereka akan tergoda untuk menghapusbukkan proyek-proyek dan aktiva-aktiva lama dari para manajer yang lama untuk menghasilkan peningkatan yang kuat pada tahun-tahun berikutnya;
2. ketika suatu perusahaan mendapatkan keuntungan besar yang tidak dapat terulang lagi, maka perusahaan mungkin akan mencari pengeluaran-pengeluaran besar untuk dibebankan;
3. ketika pendapatan khususnya mengalami penurunan, manajemen akan melihat adanya peluang untuk memasukkan pengeluaran-pengeluaran

tambahan (yang kemungkinan besar tidak akan terlihat) ke periode sekarang. Keuntungannya adalah tambahan pembebanan pada periode ini akan menyebabkan lebih sedikit pembebanan di masa depan.

Jika seorang manajer tidak dapat mengelola labanya untuk mencapai target yang diinginkan, maka manajer tersebut akan berusaha menurunkan laba periode berjalannya dengan tujuan meningkatkan laba periode mendatang. Kenaikan besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan akan mengurangi laba, sehingga perusahaan dengan laba yang menurun dapat diprediksikan memilih menaikkan jumlah penyisihannya. Chao, *et al.*, (2004) menemukan bahwa *big bath* dapat memprediksi adanya manajemen laba. Untuk menguji hal tersebut maka hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H3 : *big bath* berpengaruh positif terhadap besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan.

2.4.4 *Income Smoothing Hypothesis*

Income smoothing merupakan normalisasi laba yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai *trend* atau level laba tertentu (Belkaoui dalam Chariri dan Ghozali, 2007). Manajer akan menggunakan kebijakan akuntansinya untuk mengurangi jarak deviasi antara laba periode berjalan dengan laba yang diharapkan perusahaan (Chao, *et al.*, 2004). Jika *income smoothing* dapat digunakan untuk menjelaskan kebijakan manajer atas penilaian penyisihan, maka dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa manajer akan cenderung menurunkan besarnya penyisihan agar dapat menaikkan laba ketika laba periodik perusahaan

secara tiba-tiba menurun drastis. Begitu pula sebaliknya, manajer akan cenderung menaikkan besarnya penyisihan agar dapat menurunkan laba ketika laba perusahaan secara tiba-tiba meningkat drastis. Schrand & Wong (2003) menemukan bahwa bank menggunakan penilaian penyisihan untuk meratakan laba. Untuk menguji hal tersebut maka hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : *Income smoothing* berpengaruh positif terhadap besarnya perubahan penyisihan aktiva pajak tangguhan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Ruang lingkup pembahasan penelitian ini hanya dibatasi pada pengujian apakah *debt to equity ratio*, ukuran perusahaan, *big bath*, dan *income smoothing* memiliki pengaruh terhadap kebijakan manajer dalam menentukan besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan (DTVA). Penyisihan aktiva pajak tangguhan merupakan akun kontra aset yang mengurangi aset sampai pada nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan (Stice, *et al.*, 2009). DTVA diperoleh dari rumus berikut:

$$DTVA = \frac{\text{Penyisihan Aktiva Pajak Tangguhan } t - \text{Penyisihan Aktiva Pajak Tangguhan } t-1}{\text{Aktiva Pajak Tangguhan } t-1} \quad (3.1)$$

Penyisihan aktiva pajak tangguhan dibentuk jika kemungkinan besar aktiva pajak tangguhan perusahaan tidak dapat direalisasi. Aktiva pajak tangguhan menampilkan manfaat pajak masa depan yang berasal dari beda temporer yang dapat dikurangkan, rugi pajak, dan kredit pajak (Visvanathan dan Krishna, 2003). Analisis perubahan besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan sangat informatif

karena akun tersebut menyediakan informasi mengenai kebijakan manajer dalam menetapkan perubahan penyisihan dari satu tahun ke tahun selanjutnya. Hal ini juga merupakan pusat hipotesis penelitian ini. Informasi mengenai besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan dapat diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan pada bagian Catatan Atas Laporan Keuangan yang menjelaskan tentang pajak penghasilan.

3.1.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen (X) terdiri dari *debt to equity ratio* (DER), ukuran perusahaan (SIZE), *big bath* (BBATH), serta *income smoothing* (EARN).

3.1.2.1 *Debt to Equity Ratio*

Debt to equity ratio (DER) digunakan untuk menguji hipotesis *debt/equity*. Rasio ini merupakan proksi untuk kedekatan pada batasan hutang. Menurut Weston dan Thomas (dalam Rizky, 2006), *leverage* keuangan merupakan tingkat penggunaan hutang sebagai sumber pembiayaan perusahaan. Rasio *debt to equity* dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\% \quad (3.2)$$

Duke dan Hunt (1990) dalam Chao, *et al.*, (2004) juga menggunakan proksi *debt/equity* dalam penelitiannya. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa rasio *debt/equity* berkorelasi positif dengan keberadaan dan keketatan tiga batasan hutang utama (laba ditahan, modal kerja, dan aset berwujud bersih). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Press dan Weintrop (1990) yang

dikutip oleh Chao, *et al.*, (2004) menunjukkan bahwa pada perusahaan yang memiliki batasan akuntansi pada perjanjian hutangnya, rasio *leverage* berkorelasi dengan batasan *leverage*.

Informasi mengenai total hutang, total ekuitas, dan rasio *debt to equity* dapat diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan dan *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD).

3.1.2.2 Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan (SIZE) merupakan proksi yang paling umum digunakan untuk sensitivitas politik. Chao, *et al.*, (2004) menggunakan harga pasar saham biasa di akhir periode, *total assets*, dan *net sales* untuk mengukur ukuran perusahaan (SIZE). Menurut mereka, ketiga faktor ini dinilai karena tidak terdapat kecenderungan yang lebih untuk memilih faktor ukuran perusahaan dibanding faktor lainnya. Namun pada penelitian ini, ukuran perusahaan hanya diukur menggunakan *total assets* periode sebelumnya, karena semakin besar *total assets* perusahaan, maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Selain itu, aset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Informasi mengenai *total assets* dapat diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan dan *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD).

3.1.2.3 Big Bath

Sulit untuk mengidentifikasi perusahaan yang melakukan *big bath* dan yang tidak melakukannya. Berdasarkan hipotesis *big bath* (H4), prediksi yang

biasa digunakan adalah perusahaan akan melaporkan rugi diskresioner dan akrual pada periode yang sama ketika laba periode berjalannya negatif dan lebih rendah dari laba periode sebelumnya.

Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi perbandingan antara laba operasi periode berjalan (sebelum pajak) dengan laba operasi periode sebelumnya dengan menggunakan variabel indikator BBATH. Lebih lanjut lagi, BBATH diberi kode 1 jika laba operasi periode berjalan negatif dan lebih rendah dari laba periode sebelumnya; dan diberi kode 0 jika sebaliknya. Chao, *et al.*, (2004) menggunakan variabel indikator untuk mengungkapkan perusahaan yang mengungkapkan strategi *big bath*. Suatu perusahaan dianggap sebagai “*big bath firm*” yang potensial jika laba operasinya negatif dan lebih rendah dari laba operasi tahun sebelumnya. Sedangkan Visvanathan (1998) menguji hipotesis *big bath* menggunakan sampel perusahaan yang melaporkan rugi sebelum pajak selama periode sampel. Informasi mengenai laba operasi sebelum pajak diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD).

3.1.2.4 Income Smoothing

Pengujian *income smoothing* mengasumsikan bahwa target dari perataan laba adalah laba periode sebelumnya (laba operasi atau laba bersih). Chao *et al.*, (2004) menyebutkan bahwa penelitian Bartov (1993), Archibald (1967), dan White (1970) membenarkan penggunaan laba periode sebelumnya karena dua alasan, yaitu karena lebih sederhana dan lebih realistis dibanding definisi yang

lain; yang mana kedua hal tersebut dibutuhkan manajer untuk mencapai tingkat pertumbuhan tahunan yang konstan. Selain itu, sampai saat ini tidak ada bukti yang lebih baik mengenai model perilaku *income smoothing*.

Oleh karena itu, penelitian ini yang merupakan replikasi dari penelitian Chao, *et al.*, (2004) menggunakan laba operasi periode sebelumnya dengan meniadakan dampak perubahan pajak tangguhan sebagai target ukuran laba. Miller dan Skinner (1998) menggunakan proksi perubahan laba operasi/ total aset untuk variabel *income smoothing*. Laba operasi digunakan karena laba tersebut belum terpengaruh pajak. Operasionalisasi mereka adalah perataan mengasumsikan bahwa level sasaran laba operasi tahun ini adalah laba operasi tahun terakhir, sehingga dengan perataan, kenaikan laba operasi mendorong manajer untuk meningkatkan penilaian penyesuaian untuk meratakan laba, dan sebaliknya untuk menurunkan laba operasi.

Perbedaan antara laba operasi periode berjalan dengan target ukuran laba (laba periode sebelumnya) menyatakan jumlah laba atau rugi diskresioner yang harus diakui perusahaan dengan tujuan untuk mencapai tingkat laba yang diinginkan. Untuk menguji H5, variabel EARN diukur dengan rumus berikut:

$$\text{EARN} = \frac{\text{EBT } t - \text{EBT } t-1}{\text{Total Aset}} \quad (3.3)$$

Dimana EARN merupakan *income smoothing*, dan EBT adalah *Earning Before Tax*.

Informasi mengenai laba operasi sebelum pajak dan total aset diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005-2009 kecuali perusahaan yang tergabung dalam sektor finansial. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu dimana umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang melakukan pembukuan dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- b. periode laporan keuangan berakhir pada 31 Desember lengkap dengan catatan atas laporan keuangan;
- c. perusahaan tidak tergabung dalam sektor finansial. Perusahaan-perusahaan pada sektor finansial kemungkinan besar memiliki dorongan manajemen laba yang berbeda serta terikat oleh peraturan akuntansi dan perpajakan yang berbeda pula dengan perusahaan yang tergabung dalam sektor lainnya;
- d. mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan komponen aktiva pajak tangguhan dan penilaian penyisihan aktiva pajak tangguhan dalam Catatan atas Laporan Keuangannya selama periode 2005-2009;
- e. besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan mengalami perubahan selama periode sampel;

- f. memiliki rasio aktiva pajak tangguhan/ total aset $\geq 1\%$ selama 2005-2009. Kriteria ini ditetapkan untuk memastikan apakah besarnya aktiva pajak tangguhan memiliki nilai yang material jika dibandingkan dengan total aset perusahaan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan *go public* yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Sumber data diperoleh dari publikasi laporan keuangan perusahaan *go public* melalui situs internet www.idx.co.id atau Pojok BEI Fakultas Ekonomi UNDIP dan dilengkapi dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) tahun 2006-2010.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yang merupakan teknik pengambilan data dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang mengungkapkan penilaian atas penyisihan aktiva pajak tangguhan di bagian Catatan atas Laporan Keuangannya.

3.5 Metode Analisis

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah kemudian dianalisis dengan alat statistik sebagai berikut:

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum dan distribusi frekuensi (Ghozali, 2007). Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan program SPSS 17.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. Keempat asumsi klasik dianalisis dengan menggunakan program SPSS 17.

3.5.2.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, maka uji ini hanya diperuntukan bagi penelitian yang memiliki variabel independen lebih dari satu. Multikolinearitas dapat dilihat dengan menganalisis nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Suatu model regresi menunjukkan adanya multikolinearitas jika:

1. Tingkat korelasi > 95%,
2. Nilai Tolerance < 0,10, atau

3. Nilai VIF > 10.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2007).

3.5.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam satu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini (t) dengan kesalahan pada periode sebelumnya ($t-1$). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2007).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang berjenis homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji statistik yang digunakan adalah uji Scatter Plot. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2007).

3.5.2.4 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel-variabel memiliki distribusi normal. Data yang terdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Pengujian normalitas dilakukan dengan:

1. Analisis grafik

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji statistik *One Sample Kolmogorov Smirnov*

Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas adalah jika hasil *One Sample Kolmogorov Smirnov* diatas tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan jika hasil *One Sample Kolmogorov Smirnov* di bawah tingkat signifikansi 0,05 tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

3.5.3 Uji Hipotesis

3.5.3.1 Persamaan Regresi Linier Berganda

Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{DTVA} = \beta_0 + \beta_1 \text{DER} + \beta_2 \text{SIZE} + \beta_3 \text{BBATH} + \beta_4 \text{EARN} + e \quad (3.5)$$

Keterangan :

DTVA	=	perubahan besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan dibagi dengan aktiva pajak tangguhan periode sebelumnya
DER	=	rasio total hutang terhadap total ekuitas pada akhir periode
SIZE	=	ukuran perusahaan yang diproksikan dengan <i>total assets</i> periode sebelumnya
BBATH	=	variabel indikator yang sama dengan 1 jika laba operasi periode berjalan negatif dan lebih rendah daripada periode sebelumnya, dan sama dengan 0 jika sebaliknya
EARN	=	perubahan laba operasi periode berjalan dibagi dengan total aset akhir periode
β	=	koefisien regresi
e	=	error

Model regresi di atas mengacu pada model penelitian yang dikembangkan oleh Chao, *et al.*, (2004). Namun demikian, dalam penelitian ini penulis tidak memasukkan variabel BONUS yang ada pada model penelitian Chao, *et al.*,

(2004). Hal ini disebabkan karena di dalam laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai dasar pemberian kompensasi manajemen.

3.5.3.2 Goodness of Fit Model

3.5.3.2.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah suatu nilai yang menunjukkan besarnya perubahan yang tersaji diakibatkan oleh variabel lainnya. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase besarnya keterkaitan antara variabel independen terhadap variabel independennya. Koefisien determinasi dinyatakan dalam R^2 . Untuk variabel bebas yang lebih dari satu variabel, maka menggunakan adjusted R^2 .

3.5.3.2.2 Uji F (pengujian secara simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Cara yang dilakukan adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama);

$H_0 : \beta > 0$, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama).

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen;

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.3.2.3 Uji t (pengujian secara parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individu) terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} terhadap t_{tabel} dengan ketentuan sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$, berarti bahwa tidak ada pengaruh positif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial;

$H_0 : \beta > 0$, berarti bahwa ada pengaruh positif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial;

Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.